

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga andil dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelum teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah.

Skripsi karya M. Said Abdul Rohman, 3401405522. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2009 dalam skripsinya yang berjudul “*Cases-Based Learning* sebagai upaya Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Kudus”. Dengan metode *Cases-Based Learning* yaitu penanaman nilai-nilai Pancasila yang dilakukan dengan memberikan materi yang kontra dan persoalan yang dilematis pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk di diskusikan oleh siswa sehingga siswa mampu mengkaji secara mendalam dengan melakukan penalaran moral. Sehingga dengan pelaksanaan *Cases-Based Learning* ini dapat tertanam nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan siswa dapat bersikap dan

berperilaku secara mandiri, menghargai, tanggung jawab serta kekeluargaan.¹

Skripsi karya Rodhiani Dewi NugrahApriliani 3401407028, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2011 dalam skripsinya yang berjudul” Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam kegiatan ibu-ibu kelompok dasawisma (penelitian di RW 1 Kelurahan Argasoka Kec/Kab Banjarnegara)”. Pada skripsi tersebut dalam penelitian lebih di tekankan kepada ibu-ibu dasawisma, dengan tertanamnya nilai-nilai Pancasila pada ibu-ibu dasawisma tersebut dapat memantau anak-anaknya untuk juga berperilaku sesuai norma dan hukum yang berlaku. Sehingga pengawasan perilaku kepada anak-anaknya lebih maksimal karena orang tua sudah faham bagaimana nilai luhur Pancasila dan norma yang berlaku.²

Jurnal karya Revasonia Izati Program Studi PPKN FIS Universitas Negeri Jakarta yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Perilaku Nasionalisme Siswa (Studi Deskriptif Kualitatif di SMA Negeri 1 Sukatani)”. Dengan latar belakang masalah bahwa bangsa Indonesia merupakan Negara pewaris

¹ M. Said Abdul Rohman,” *Cases-Based Learning sebagai upaya Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Kudus* “, Skripsi (Semarang: Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri, 2009).

²Rodhiani Dewi Nugrah Apriliani, *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam kegiatan ibu-ibu kelompok dasawisma (penelitian di RW 1 Kelurahan Argasoka Kec/Kab Banjarnegara)*”, Skripsi (Semarang: Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri, 2011).

kepulauan terbesar di dunia dan segala keberagaman dan keunikannya bagi bangsa Indonesia bahwa konsep persatuan dan kesatuan sangat bermakna dan menyadari bahwa Pancasila merupakan roh dan jiwa yang digali dari nilai-nilai luhur yang telah lama ada dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Yang kemudian peneliti mengungkap bagaimana perilaku siswa terhadap nasionalisme.³

Jurnal Karya Tati Fauziah program studi Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia tahun 1998 yang berjudul “Implementasi Pendekatan Analisis Nilai pada Sekolah Dasar dalam Pembelajaran PPKN” melalui Pendidikan Kewarganegaraan di harap dapat mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari kemudian melalui Implementasi Pendekatan Analisis Nilai pada mata pelajaran PPKN ini guru bukan satu-satunya narasumber dalam pembelajaran melainkan berperan sebagai mediator, stabilisator, dan manajer pembelajaran sehingga motivasi belajar siswa bisa meningkat.⁴

Dari telaah pustaka yang penulis baca, hasil dari penelitian tersebut belum menganalisa seluruh cara dan metode secara rinci, sehingga dalam penelitian ini akan diperinci lagi sehingga dalam

³Reva Sonia Izati, “*Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Perilaku Nasionalisme Siswa (Studi Deskriptif Kualitatif di SMA Negeri 1 Sukatani)*”, (Jakarta: Program Studi PPKN FIS Universitas Jakarta, 2013).

⁴Tuti Fauziah, “*Implementasi Pendekatan Analisis Nilai pada Sekolah Dasar dalam Pembelajaran PPKN*”, Tesis (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 1998).

proses menanamkan perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan norma yang berlaku.

B. Kerangka Berfikir

1. Internalisasi

Secara etimologi Internalisasi berasal dari kata *Intern* atau *Internal* yang berarti bagian dalam atau di dalam, sedangkan Internalisasi berarti penghayatan.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia internalisasi merupakan suatu proses penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga keyakinan akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.⁶

Internalisasi adalah proses pemasukan nilai pada seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. Nilai-nilai tersebut bisa jadi berbagai aspek baik agama, budaya, norma sosial dll. Pemaknaan atas nilai inilah yang mewarnai pemaknaan dan penyikapan manusia terhadap lingkungan dan kenyataan di sekelilingnya.⁷

Berger dan Luckmann (1990:87) menyatakan, dalam internalisasi, individu mengidentifikasi diri dengan

⁵<http://bayoscreamo.blogspot.com/2011/10/pengertian-internalisasi-belajar.html> . diakses 10 Oktober 2014

⁶<http://kbbi.web.id/internalisasi>. diakses 31 oktober 2014

⁷<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100612063612AAxx7IH> diakses 05 november 2014

berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial dimana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif.⁸

Bandura, dalam situasi sosial ternyata orang bisa belajar lebih cepat dengan mengamati atau melihat tingkah laku orang lain.⁹

Dan dalam suatu usaha dalam menerapkan Nilai-nilai *Notonagoro* mengajukan empat langkah yang harus ditempuh yaitu:

- a) Para pendidik terlebih dahulu harus tahu dan jelas dengan akal budinya, memahami dengan hatinya nilai-nilai apa saja yang akan di ajarkan pada peserta didik.
- b) Para pendidik mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik dengan sentuhan hati dan perasaan, melalui contoh keteladanan pendidik sehingga peserta didik dapat melihat alangkah baiknya nilai itu.
- c) Membantu peserta didik untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut tidak hanya dalam akal budinya tetapi dalam

⁸Masyarakat Kebudayaan dan Politik” Memahami Teori Konstruksi Sosial”,Putera Manuaba,(Vol 21,NO.3:221-230), http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119:memahami-teori-konstruksi-sosial&catid=34:mkp&Itemid=62, diakses 7 November 2014.

⁹ Singgih D Gunarsa, “*Dasar dan Teori Perkembangan Anak*”, (Jakarta: Gunung Mulia, 1997), hlm,184.

sanubari peserta didik agar nilai-nilai tersebut merasa dimiliki dan menjadikan landasan bertingkah laku.

- d) Peserta didik yang telah merasa memiliki sifat-sifat dan sikap hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut akan terwujud dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari.¹⁰

Internalisasi dilakukan dalam berbagai macam konteks lingkungan masyarakat, sehingga strategi dan metode yang diterapkan harus sesuai dengan lingkungan sosial masyarakat pada tingkat pengetahuan serta karakteristik masyarakat.¹¹

2. Nilai-nilai

Bentuk-bentuk nilai lain yang sebaiknya diajarkan di sekolah adalah nilai kejujuran, keadilan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri, tolong menolong, peduli sesama, kerjasama, keberanian, dan sikap demokratis, nilai-nilai khusus tersebut merupakan bentuk dari rasa hormat dan tanggung jawab ataupun sebagai media pendukung untuk bersikap hormat dan bertanggung jawab.¹²

Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai berguna dan dapat

¹⁰ Sutarjo Adisusilo, J.R, *Pembelajaran Nilai-Karakter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 73.

¹¹ Kaelan, M.S, *Negara Kebangsaan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma 2013), hlm.687.

¹² Thomas Lickona, *Educating for Character:How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),hlm.74.

membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat, nilai merupakan preferensi yang tercermin dari perilaku dan nilai akan selalu berhubungan dengan kebaikan, kebajikan dan keluhuran budi serta akan menjadi sesuatu yang dihargai dan dijunjung tinggi serta dikejar oleh seseorang sehingga ia merasakan kepuasan dan merasa menjadi manusia yang sempurna.¹³

Kemudian terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak ukur dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta hierarki nilai, misalnya kalangan nilai materialis memandang bahwa nilai tertinggi adalah nilai materi, kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah kenikmatan. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan tersebut dan penggolongan tersebut amat beraneka ragam, tergantung pada sudut pandang dalam rangka penggolongan tersebut.¹⁴

Banyak ragam nilai dan karakter yang penting dan perlu diperkenalkan pada anak sehingga bisa membentuk pribadi yang berwatak baik dan menunjang keberhasilan anak kelak ketika hidup di masyarakat. Melalui sekolah yang

¹³ Sutarjo Adisusilo, J.R, *Pembelajaran Nilai-Karakter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm,56-57.

¹⁴ Kaelan, M.S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm .19.

dipandang sangat efektif untuk bisa membudayakan apa yang sering disebut dengan Nilai-nilai budi pekerti.¹⁵

Dan kebudayaan pada nilai-nilai sosial ialah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi dan sedang terjadi. Budaya merupakan sebuah proses pemahaman bukan hanya untuk memahami alam atau realitas eksternal melainkan juga sistem sosial yang merupakan bagian dari identitas sosial tersebut.¹⁶

3. Pancasila

a. Pengertian Pancasila

Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia dan dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa Indonesia dan gagasan-gagasan besar bangsa Indonesia sendiri.

¹⁵ Syamsul Ma'arif, Dkk, "*School culture di madrasah dan sekolah*", (Penelitian kolektif : Semarang 2012), hlm,58

¹⁶ John Fiske, *Cultural and Communication Studies*, (Bandung: Jalasutra, 2004), hlm,167.

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan da bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Suatu kesatuan bagian-bagian, b. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, c. Saling berhubungan, saling ketergantungan, d. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama, e. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila, setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri untuk tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹⁷

Pancasila dalam kehidupannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*philosoficche Gronslag*) dari negara, ideologi negara atau (*staatsidee*). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.¹⁸

Sehingga Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai pandangan hidup seluruh bangsa

¹⁷Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan(PPKn)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm, 9.

¹⁸Sutoyo, *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm, 20.

Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila diambil dari akar budaya bangsa kita sendiri, bukan dari budaya asing. Secara turun temurun nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tertanam dalam diri setiap warga negara Indonesia. Sebagai dasar Negara Pancasila memiliki nilai-nilai yang dituangkan dalam butir-butir Pancasila.¹⁹

Dalam suatu penghayatan material Pancasila yaitu sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pedoman hidup bangsa, filsafat hidup bangsa, perjanjian luhur Bangsa Indonesia, sebagai dasar NKRI dan sumber Hukum NKRI. Dan berfungsi sebagai Dasar Negara yang pada hakikatnya sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.²⁰

b. Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara membuat bangsa Indonesia memiliki pondasi dan pendirian yang kokoh untuk terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan tidak terpengaruh atau goyah dengan gangguan dari pihak luar yang berusaha untuk mengganggu stabilitas bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan

¹⁹Arsyad Umar ,dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD kelas IV*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm.79.

²⁰Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila.*,hlm,300.

suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis oleh karena itu sebagai suatu dasar filsafat maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarki dan sistematis, dalam pengertian inilah maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Karena merupakan suatu sistem filsafat maka kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri melainkan memiliki esensi yang utuh.²¹

Sebagai suatu dasar filsafat negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya namun kesemuanya itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis namun tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan sila-sila lainnya.²²

Nilai merupakan hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati. Langkah – langkah awal dari nilai adalah seperti halnya ide manusia yang merupakan potensi pokok. Nilai tidak tampak dalam dunia pengalaman. Tapi dia nyata dalam jiwa manusia.

²¹Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila &Kewarganegaran*, hlm, 25-26.

²²Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 31.

Notonagoro salah seorang pemikir Indonesia yang mengembangkan pancasila secara kefilosofan, dan membagi nilai menjadi tiga macam yaitu:

1. Nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia, misalnya buah-buahan, makanan, sayuran, yang semuanya berguna untuk jasmani manusia.
2. Nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi manusia peralatan-peralatan untuk membantu kerja manusia.
3. Nilai kerohanian, segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dibedakan menjadi 4 macam:
 - a) Nilai kebenaran yang bersumber pada unsur akal manusia (cipta), misal pertanyaan-pertanyaan dalam bidang ilmiah.
 - b) Nilai kebaikan yang bersumber pada unsur kehendak manusia (karsa), misal hidup sejahtera, menyumbang yang terkena bencana alam.
 - c) Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia (rasa), misal menikmati hasil karya seni menikmati pemandangan alam.
 - d) Nilai religius yang bersumber pada kepercayaan ketuhanan (kepercayaan), memenuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa.²³

²³ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 303.

Hal ini dapat terlihat pada susunan Pancasila yang secara sistematis dan hirarkis yaitu bahwa nilai-nilai sila dalam Pancasila tersebut saling mendasari dimulai dari “Ketuhanan Yang Maha Esa” sampai dengan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bahwa yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia.

Nilai sila setiap Pancasila juga mengandung nilai, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus menjiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa di Indonesia ini meskipun berbeda-beda agama tetapi mereka tetap memiliki Jiwa Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Nilai kemanusiaan yang adil

mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil.

Bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kehidupan kenegaraan harus senantiasa dilandasi oleh moral kemanusiaan antara lain dalam kehidupan pemerintah negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya pertahanan dan keamanan serta dalam kehidupan keagamaan. Oleh karena itu dalam kehidupan bersama dalam negara harus dijiwai oleh moral kemanusiaan untuk saling menghargai sekalipun terdapat suatu perbedaan karena hal itu merupakan suatu bawaan kodrat manusia untuk saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama.

3. Persatuan Indonesia

Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa, suku, ras, kelompok, dan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Oleh karena itu tujuan negara dirumuskan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya untuk melindungi segenap

warganya dan seluruh tumpah darahnya , memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan warganya serta dalam kaitannya dengan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk mewujudkan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh karena itu perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia, beraneka ragam tetapi satu mengikat diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukan untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan untuk saling menguntungkan persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia.

4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan didasari oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tersebut dikongkritisasikan dalam kehidupan bersama yaitu kehidupan kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik,

maupun aspek hukum dan perundang-undangan. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila kelima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama atau keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama ((kehidupan sosial). Dan keadilan tersebut juga didasari dalam hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, masyarakat, bangsa negaranya dan manusia dengan Tuhannya.²⁴

Demikianlah nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Sehingga dalam Sila ke-1 adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa, Sila ke-

²⁴Kaelan., hlm, 31-36.

2 menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, sila ke-3 menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama, Sila ke-4 mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia, Sila ke-5 mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama yang mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab serta menjunjung tinggi asas musyawarah dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan agar tercapainya tujuan bersama.²⁵

Dan realisasi nilai-nilai Pancasila dasar filsafat Negara Indonesia. Perlu secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik di sekolah dalam masyarakat dan keluarga sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Pengetahuan, yaitu suatu pengetahuan yang benar tentang Pancasila baik aspek nilai, norma maupun aspek praksisnya. Hal ini dapat disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan individu. *Kesadaran*, yang selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. *Ketaatan*, yaitu selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi wajib lahir dan batin dari diri sendiri. *Kemampuan kehendak*, yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan. *Watak dan hati nurani*, agar orang selalu mawas diri.²⁶

²⁵ Ani Sri Rahayu, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, hlm,36.

²⁶ Kaelan, M.S, Negara Kebangsaan Pancasila, hlm.685.

4. Pembelajaran PKn Pada Tingkat Dasar

a. Pengertian Pembelajaran PKn SD/MI

Pendidikan kewarganegaraan merupakan topik sentral dalam pendidikan multikultural dalam masyarakat pluralistis seperti Indonesia. Apa yang merupakan inti dari pendidikan kewarganegaraan dengan singkat dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah mengembangkan seseorang sebagai warga negara yang baik (*Good Citizen*).²⁷

Pembelajaran PKn SD/MI adalah suatu program pendidikan yang berupa sosialisasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi yang meliputi unsur-unsur hak dan kewajiban warga negara dalam negara Indonesia. Secara substantif pembelajaran PKn SD/MI menyangkut sosialisasi, diseminesi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan meliputi unsur-unsur hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam suatu negara.²⁸

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral

²⁷ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) ,hlm. 215.

²⁸ Lapis PGMI, *Pembelajaran PKn MI*, (Surabaya: Aprinta, 2009),hlm .1-13

tersebut diharapkan dapat mewujudkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari siswa baik individual maupun sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.²⁹

Menurut UU No. 2/1989 pasal 39 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendahuluan bela negara agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.³⁰

Melalui pembelajaran PKn pada tingkat dasar peserta didik diharapkan memiliki pondasi jati diri bangsa Indonesia sehingga tingkah laku serta moral anak bangsa bisa mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu menjadi insan Pancasila. Yang mampu menjadi warga negara yang baik serta dapat diandalkan oleh bangsa dan negara untuk kemajuan Indonesia.

b. Tujuan pembelajaran PKn SD/MI

Pembelajaran PKn untuk persekolahan sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu yang erat dengan kenegaraan, yakni ilmu politik dan hukum yang terintegrasi dengan

²⁹ Aziz Wahab, dkk, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, hlm. 2.5.

³⁰ Muhammad Numan Soemantri, *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 154.

humaniora dan dimensi keilmuan lainnya yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart and good citizen*). Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), sikap dan nilai (*attitude and value*), yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.³¹ Kajian tentang kewarganegaraan diharapkan akan bermuara pada nilai sentral yaitu moral Pancasila.³²

Adapun tujuan pembelajaran PKn SD/MI adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut:

1. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

³¹Supriya, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 5.

³²Soemantri, *Mengagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, hlm.167.

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peredaran dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan tujuan pembelajaran PKn SD/MI yaitu peserta didik mampu menjadi warga negara yang baik , tahu , mau dan sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan harapan kelak menjadi bangsa yang terampil dan cerdas dan bersikap baik sehingga mampu mengikuti kemajuan teknologi modern.

Selain itu tujuan PKn yaitu mengembangkan pengetahuan, kemampuan memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam rangka membentuk sikap dan perilaku sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara yang bertanggung jawab serta memberi bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan di jenjang menengah.

c. Ruang Lingkup Pembelajaran PKn SD/MI

Ruang lingkup pembelajaran PKn SD/MI sebagaimana yang dinyatakan pada kurikulum nasional yang tercantum dalam Permendiknas 22/2006 tentang standar isi adalah sebagai berikut:

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta keluarga, kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

- 2) Norma, hukum, dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- 4) Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- 5) Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 6) Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi-pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.

- 7) Kedudukan Pancasila, meliputi pancasila sebagai dasar negara dari ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 8) Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi.³³

Demikian ruang lingkup yang terdapat pada pembelajaran PKn SD/MI. Yaitu pembahasan tentang persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warganegara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, kedudukan pancasila serta globalisasi.

³³<http://paklativi.blogspot.com/2014/03/ruang-lingkup-kajian-dan-tujuan-pembelajaran-pkn-di-sd-mi.html>. diakses 12-11-2014